

**HUBUNGAN KAUSALITAS DARI TINGKAT
PENDIDIKAN, PENDAPATAN, DAN KONSUMSI
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI
PROVINSI JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

Nita Anggraini

NIM. C2B607041

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nita Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607041
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : **HUBUNGAN KAUSALITAS DARI TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, DAN KONSUMSI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA TENGAH.**

Dosen Pembimbing : Banatul Hayati, SE, M.Si

Semarang, 12 Maret 2012

Dosen Pembimbing,

(Banutul Hayati, SE, M.Si)

NIP. 19680316 199802 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Nita Anggraini

Nomor Induk Mahasiswa : C2B607041

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : **HUBUNGAN KAUSALITAS DARI TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, DAN KONSUMSI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI JAWA TENGAH.**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 2 April 2012

Tim Penguji

1. Banatul Hayati, SE, M.Si (.....)

2. Prof. Dr. H. Purbayu BS, MS (.....)

3. Achma Hendra Setiawan, S.E.,M.Si (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, **Nita Anggraini**, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Hubungan Kausalitas dari Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Konsumsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 12 Maret 2012

Yang membuat pernyataan,

Nita Anggraini

NIM : C2B607041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

KEJARLAH DUNIA SEOLAH-OLAH KITA AKAN HIDUP 1000 TAHUN LAGI,
DAN KEJARLAH AKHERAT SEOLAH-OLAH KITA AKAN MATI BESOK PAGI..

*Kupersembahkan untuk ayah dan bunda,
yang selalu ada mendampingiku setiap waktu.
Kakak dan adekku yang memberi canda dan tawa
setiap hari. Dan orang-orang terdekatku, yang
memberi semangat dan cinta.*

ABSTRACT

Poverty represent complex problem influenced by various factor which each other is interconnected, such as income level of society, unemployment, health, education, access to service and goods, location, geographical, and environment. The higher of poor people in Central Java show the low level of public welfare in Central Java.

This research aim to analyse direct and indirect influence of some variables such as : mean years of schooling, Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, and expenditure per capita to the number of poor people in Central Java Province in 2009. This research use path analysis using data cross section from Regency/City in Central Java Province in 2009 with supporting software from SPSS to analyze the data. Data used in this research is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS).

The result shows that all variable (mean years of schooling, GRDP per capita, and expenditure per capita) related to poverty (the number of poor people) having the character of signifikan and negativity. Mean years of schooling variable have an effect on positive directly and signifikan to GRDP per capita and have an effect on positive indirectly to expenditure per capita, GRDP per capita variable have an effect on positive directly and signifikan to expenditure per capita. Most dominant variable influence the amount of poor people in Central Java Province is mean years of schooling.

Keyword : The number of poor people, mean years of schooling, GRDP per capita, expenditure per capita, and path analysis.

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan lingkungan. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah penduduk miskin, menunjukkan proses pembangunan yang belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel rata-rata lama sekolah, PDRB per kapita, dan pengeluaran per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*) yang menggunakan data antar ruang (*cross section*) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 dengan bantuan aplikasi program SPSS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang berhubungan dengan kemiskinan (jumlah penduduk miskin) bersifat negatif dan signifikan. Variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap PDRB per kapita dan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap pengeluaran per kapita, variabel PDRB per kapita berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita. Variabel yang paling dominan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah adalah variabel rata-rata lama sekolah.

Kata kunci : jumlah penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, PDRB per kapita, pengeluaran per kapita, dan analisis jalur (Path Analysis).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya penulis sampai saat ini masih diberikan bermacam kenikmatan tiada ternilai harganya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Kausalitas dari Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Konsumsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Adalah suatu hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro beserta Staf Pengajar, Staf Administrasi, Tata Usaha serta Staf Keamanan dan pihak-pihak intern Fakultas yang lain yang selama ini membantu proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
2. Ibu Banatul Hayati, SE., Msi, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan, solusi, dan kebijaksanaannya selama ini.
3. Ibu Johanna Maria Kodoatie, SE., M.Ec, Ph.D selaku Koordinator Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Terima kasih atas kebijaksanaan serta motivasinya kepada penulis.

4. Bapak Prof. Drs. H. Waridin, MS., Ph.D selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis selama Penulis belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Ayah dan Bunda tercinta, terima kasih atas segala kepercayaan, kasih sayang yang tulus, dukungan, materi, fasilitas, serta tak lupa terima kasih atas doanya.
6. Kakakku dan adikku tersayang. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya.
7. Riva Ardiwinansah, terima kasih sudah membuat hidupku lebih indah. Dan doakan aku untuk menjadi orang yang sukses.
8. Petugas perpustakaan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data.
9. Seluruh keluarga besar IESP 07: Galifta, Hasya, Annisa, Jeje, Dita, Selvi, Septy, Bayu, Ottis, Bagus Teponk, Bagus John, Antok, Wisnu Adi, ElsaBetha, Surya, Pungki, Ilham Gestafi, Yogatama, Talitha, mba' Ulfa, mba' Betty, Akbar, Maulana, Lutfi, Diana, Djulham, Arjanggi, Sukma, Ferry, dan seluruh teman-teman IESP 2007 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan kenangan yang telah kalian berikan. Senang bersama kalian.

10. Tim KKN Desa Kalijambe Kecamatan Bringin 2011: Amanda, Gupita, Dipa Manggala, Lutfi, Ariyanto, Alhaq, Ajik, Lely, Elmayanti Hotmari, Dhani, Adi (35 hari bersama menjadi saudara).

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah penulis dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ikut mendo'akan semoga semua amal kebaikan pihak-pihak sebagaimana tercantum di atas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 12 Maret 2012

Nita Anggraini

C2B607041

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Landasan Teoritis	19
2.1.1. Pengertian Kemiskinan	19
2.1.2. Penyebab Kemiskinan	20
2.1.3. Ukuran Kemiskinan	23
2.1.4. Indikator Kemiskinan	26
2.1.5. Teori Lingkaran Kemiskinan	27
2.1.6. Pendidikan	30
2.1.7. PDRB per Kapita	31
2.1.8. Teori Konsumsi	33
2.1.9. Teori Konsumsi Keynes	35
2.1.10 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Penda- patan	37
2.1.11 Hubungan Tingkat Pendidikan dan Penda- patan dengan Konsumsi	37
2.1.12 Hubungan Tingkat Konsumsi dengan Kemis- kinan	38
2.2. Penelitian Terdahulu	38
2.3. Hipotesis Penelitian	42
2.4. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .	47
3.2. Jenis dan Sumber Data	49

3.3.	Metode Analisis	50
3.3.1.	Diagram Jalur	55
3.3.2.	Persamaan Struktural	57
3.3.3.	Koefisien Jalur	58
3.3.4.	Koefisien Determinasi	58
3.3.5.	Pengujian Koefisien Jalur	58
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian	65
4.1.1.	Keadaan Geografis	65
4.1.2.	Kemiskinan di Jawa Tengah	66
4.1.3.	Indikator Komposit IPM	68
4.1.4.	PDRB per Kapita	70
4.2.	Analisis Data	73
4.2.1.	Matriks Korelasi Antar Variabel	73
4.2.2.	Koefisien Jalur	74
4.2.3.	Pengujian Koefisien Jalur	75
4.3.	Intepretasi Hasil	92
BAB V	PENUTUP	96
5.1.	Kesimpulan	96
5.2.	Keterbatasan	98
5.3.	Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia Tahun 2009 – 2009	3
Tabel 1.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2009	5
Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Miskin, PDRB per kapita, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per kapita menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009	7
Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Miskin, Rata-rata Lama Sekolah, dan PDRB per kapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009	9
Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Miskin, PDRB per kapita, dan Pengeluaran per kapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009	12
Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Miskin, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per kapita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009	14
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	40
Tabel 4.1. Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2009	65
Tabel 4.2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009	67
Tabel 4.3. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009	70
Tabel 4.4. Matriks Korelasi yang dijadikan sebagai Input Data	71
Tabel 4.5. Koefisien Jalur	72
Tabel 4.6. Hasil Uji Hipotesis	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier	28
Gambar 2.2. Lingkaran Kemiskinan dari Nurkse	29
Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Hubungan Kausalitas Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Konsumsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin	44
Gambar 3.1. Diagram Jalur dari Hubungan Kausalitas Tingkat Pendidikan, Pendapatan, dan Konsumsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2000:20). Oleh sebab itu, prioritas pembangunan adalah menghapuskan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan lingkungan.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengalami kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori perkapita per hari.

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan (World Bank, 2007).

Banyak dampak negatif yang disebabkan oleh kemiskinan, selain timbulnya banyak masalah-masalah sosial, kemiskinan juga dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Kini di Indonesia jerat kemiskinan semakin parah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2008 saja mencapai 34,96 juta atau 15,42 persen. Pada tahun 2009 jumlah kemiskinan mencapai 32,53 juta atau 14,15 persen.

Berikut adalah gambaran umum penduduk miskin menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia pada tahun 2008 dan 2009 :

Tabel 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Provinsi dan Daerah di Indonesia
Tahun 2008 – 2009 (jiwa)

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
		2008	2009	2008	2009
1	NAD	959,70	892,86	23,53	21,80
2	Sumatra Utara	1613,83	1499,68	12,55	11,51
3	Sumatra Barat	477,21	429,25	10,67	9,54
4	Riau	566,67	527,49	10,63	9,48
5	Kep.Riau	136,36	128,21	9,18	8,27
6	Jambi	260,28	249,69	9,32	8,77
7	Sumatra Selatan	1249,61	1167,87	17,73	16,28
8	Kep.Bangka Belitung	86,73	76,63	8,58	7,46
9	Bengkulu	351,97	324,13	20,64	18,59
10	Lampung	1591,58	1558,28	20,98	20,22
11	DKI Jakarta	379,62	323,17	4,29	3,62
12	Jawa Barat	5322,44	4983,57	13,01	11,96
13	Banten	816,74	788,07	8,15	7,64
14	Jawa Tengah	6189,63	5725,69	19,23	17,72
15	D.I Yogyakarta	616,28	585,78	18,32	17,23
16	Jawa Timur	6651,28	6022,59	18,51	16,68
17	Bali	215,70	181,72	6,17	5,13
18	Nusa Tenggara Barat	1080,61	1050,95	23,81	22,78
19	Nusa Tenggara Timur	1098,33	1013,15	25,65	23,31
20	Kalimantan Barat	508,78	434,77	11,07	9,30
21	Kalimantan Tengah	199,99	165,85	8,71	7,02
22	Kalimantan Selatan	218,90	175,98	6,48	5,12
23	Kalimantan Timur	286,44	239,22	9,51	7,73
24	Sulawesi Utara	223,55	219,57	10,10	9,79
25	Gorontalo	221,62	224,62	24,88	25,01
26	Sulawesi Tengah	524,70	489,84	20,75	18,98
27	Sulawesi Selatan	1031,75	963,57	13,34	12,31
28	Sulawesi Barat	171,08	158,23	16,73	15,29
29	Sulawesi Tenggara	435,89	434,34	19,53	18,93
30	Maluku	391,32	380,01	29,66	28,23
31	Maluku Utara	105,05	98,00	11,28	10,36
32	Papua	733,15	760,35	37,08	37,53
33	Papua Barat	246,50	256,84	35,12	35,71
	Indonesia	34963,26	32529,97	15,42	14,15

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Tabel 1.1 menjelaskan perbedaan jumlah penduduk miskin disetiap provinsinya yang terjadi di Indonesia. Hal ini akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya akan menyebabkan kesenjangan antardaerah akan semakin besar. Wilayah Jawa, yang selama ini merupakan wilayah yang relatif lebih maju dibandingkan dengan wilayah lainnya, ternyata tidak lepas dari persoalan kemiskinan. Tahun 2009 Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai penduduk miskin yang cukup banyak yaitu masing-masing 5,7 juta jiwa dan 6,1 juta jiwa. Dari sisi penurunan persentase jumlah penduduk miskin dari tahun 2008 Jawa Timur mengalami penurunan yang lebih baik, yaitu Jawa Tengah sebesar 19,23% pada 2008 menjadi 17,72% pada 2009 sedangkan Jawa Timur sebesar 18,51% pada tahun 2008 menjadi 16,68% pada tahun 2009. Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan angka kemiskinan yang lebih lambat dibanding dengan Jawa Timur.

Dari fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang tingkat kemiskinannya paling tinggi di antara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, dan juga memiliki jumlah serta persentase penduduk miskin yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin menurut desa/kota di Jawa Tengah selama tahun 1996 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1996 - 2009

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
1996	1.973,4	4.444,2	6.417,6	20,67	22,05	21,61
1999	3.062,2	5.723,2	8.755,4	27,80	28,05	28,46
2002	2.762,3	4.546,0	7.308,3	20,50	24,96	23,06
2003	2.520,3	4.459,7	6.980,0	19,66	23,19	21,78
2004	2.346,5	4.497,3	6.843,8	17,52	23,64	21,11
2005	2.671,2	3.862,3	6.533,5	17,24	23,57	20,49
2006	2.958,1	4.142,5	7.100,6	18,90	25,28	22,19
2007	2.687,3	3.869,9	6.577,2	17,23	23,45	20,43
2008	2.556,5	3.633,1	6.189,6	16,34	21,96	19,23
2009	2.420,9	3.304,8	5.725,7	15,41	19,89	17,72

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Menurut Tabel 1.3, jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996 – 2009 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada periode 1996 – 1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 2,338 juta orang karena krisis ekonomi, yaitu dari 6,418 juta orang pada tahun 1996 menjadi 8,755 juta orang pada tahun 1999, atau secara persentase meningkat dari 21,61% menjadi 28,46%.

Bagian terbesar penduduk miskin hidup di desa. Pada tahun 2009 persentase penduduk miskin di desa sebesar 189,89%, sedangkan di kota sebesar 15,41% lebih rendah dibanding di desa. Ini dikarenakan sarana dan prasarana yang ada di desa masih sangat minim. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya

kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan (Faulinaangelia, 2011).

Penyebab kemiskinan berlandaskan pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari Nurkse, 1953. Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi di mana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi

Dari teori Nurkse maka dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan besarnya konsumsi. Variabel-variabel tersebut dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap besarnya jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Berikut disajikan data tentang jumlah penduduk miskin, tingkat pendapatan yang diukur dengan PDRB per kapita, tingkat pendidikan yang diukur

dengan rata-rata lama sekolah, dan besarnya konsumsi yang diukur dengan pengeluaran per kapita menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2009 :

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Miskin, PDRB per Kapita, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2009

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	PDRB per kapita (ribu rupiah)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita (rupiah)
1	Aceh	892,86	7.376	8,6	571.449
2	Sumatera Utara	1499,68	8.421	8,6	532.442
3	Sumatera Barat	429,25	7.553	8,5	585.115
4	Riau	527,49	17.663	8,6	658.298
5	Kep. Riau	128,21	25.291	8,1	705.993
6	Jambi	249,69	5.741	7,7	482.807
7	Sumatera Selatan	1167,87	8.369	7,7	491.752
8	Kep. Bangka Belitung	76,63	8.996	7,4	614.532
9	Bengkulu	324,13	4.609	8,2	448.055
10	Lampung	1558,30	4.827	7,7	503.819
11	DKI Jakarta	323,17	40.269	10,3	938.383
12	Jawa Barat	4983,57	7.292	7,7	528.206
13	Banten	788,10	7.363	8,0	637.662
14	Jawa Tengah	5725,69	5.346	7,1	398.007
15	DI Yogyakarta	585,78	5.726	8,8	547.739
16	Jawa Timur	6022,59	8.588	7,2	456.109
17	Bali	181,72	7.386	7,8	576.821
18	Nusa Tenggara Barat	1050,95	4.130	6,6	399.278
19	Nusa Tenggara Timur	1013,10	2.578	6,6	489.072
20	Kalimantan Barat	434,77	6.715	6,6	520.155
21	Kalimantan Tengah	165,85	8.458	7,8	572.826
22	Kalimantan Selatan	175,98	8.272	7,5	622.475
23	Kalimantan Timur	239,22	33.333	8,7	864.823
24	Sulawesi Utara	219,57	7.465	8,8	412.139
25	Gorontalo	224,62	2.755	7,2	399.953
26	Sulawesi Tengah	489,80	6.400	7,9	550.584
27	Sulawesi Selatan	963,60	5.983	7,4	586.129
28	Sulawesi Barat	158,23	3.919	7,1	352.621
29	Sulawesi Tenggara	434,34	5.084	7,9	584.063
30	Maluku	380,01	2.981	8,6	476.448
31	Maluku Utara	98,00	2.882	8,2	738.107
32	Papua	760,35	10.931	6,4	758.961
33	Papua Barat	256,84	9.099	8,2	715.711

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah penduduk miskin, PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2009. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi kedua yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa setelah Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata lama sekolah terendah di Pulau Jawa yaitu sebesar 7,1. Dan untuk PDRB per kapita, provinsi Jawa Tengah memiliki PDRB perkapita terendah di Pulau Jawa yaitu sebesar 5.346 ribu rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran per kapita, Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki pengeluaran per kapita paling sedikit di antara provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa yaitu sebesar 398.007 rupiah.

Di berbagai literatur ekonomi sudah banyak diungkapkan bahwa tingkat pendidikan, jumlah pendapatan dan konsumsi merupakan faktor-faktor yang paling fundamental mempengaruhi tingkat kemiskinan (Arief Daryanto dan Yundi Hafizrianda, 2010).

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005).

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pendapatan. Hal tersebut akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Berikut disajikan data

tentang tingkat pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan tingkat pendapatan yang diukur dengan PDRB per kapita serta jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 :

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Miskin, Rata-rata Lama Sekolah, dan PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	PDRB per kapita (rupiah)
1	Kab. Cilacap	318.751	6,72	7.067.398,15
2	Kab. Banyumas	319.848	7,72	2.914.069,53
3	Kab. Purbalingga	205.012	6,81	2.651.488,22
4	Kab. Banjarnegara	184.023	6,20	2.987.138,65
5	Kab. Kebumen	309.607	6,84	2.269.712,22
6	Kab. Purworejo	121.394	7,70	3.962.525,21
7	Kab. Wonosobo	194.023	6,27	2.297.336,29
8	Kab. Magelang	176.488	7,26	3.266.477,81
9	Kab. Boyolali	148.240	7,29	4.313.871,40
10	Kab. Klaten	220.180	7,93	3.655.531,20
11	Kab. Sukoharjo	94.449	8,36	5.663.606,21
12	Kab. Wonogiri	184.880	6,29	2.368.010,26
13	Kab. Karanganyar	118.791	7,17	5.816.255,42
14	Kab. Sragen	167.299	6,88	3.306.501,85
15	Kab. Grobogan	247.473	6,76	2.212.710,49
16	Kab. Blora	145.954	6,25	2.362.367,54
17	Kab. Rembang	147.154	6,85	3.585.066,64
18	Kab. Pati	184.052	6,95	3.459.368,68
19	Kab. Kudus	84.861	8,11	16.030.016,80
20	Kab. Jepara	104.744	7,40	3.687.308,59
21	Kab. Demak	202.236	7,26	2.684.238,22
22	Kab. Semarang	96.724	7,40	5.790.621,57
23	Kab. Temanggung	105.831	6,86	3.214.417,07
24	Kab. Kendal	152.431	6,90	5.254.589,18
25	Kab. Batang	112.169	6,34	3.188.276,06
26	Kab. Pekalongan	151.634	6,66	3.181.135,26
27	Kab. Pemalang	303.727	6,49	2.366.820,13
28	Kab. Tegal	195.456	6,42	2.315.180,20
29	Kab. Brebes	432.398	5,62	2.999.444,69
30	Kota Magelang	13.654	10,10	8.338.057,75
31	Kota Surakarta	77.971	10,32	9.121.278,65
32	Kota Salatiga	14.051	9,75	4.771.289,44
33	Kota Semarang	73.137	9,98	13.396.289,90
34	Kota Pekalongan	23.342	8,66	7.144.807,46
35	Kota Tegal	23.428	8,25	4.882.189,69

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Pada Tabel 1.4 terlihat bahwa rata-rata lama sekolah yang tinggi lebih cenderung memiliki PDRB per kapita yang tinggi pula. Sehingga jumlah penduduk miskin menjadi semakin rendah. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Surakarta yaitu 10,32 tahun dengan PDRB per kapita sebesar 9.121.278,65 rupiah. Sedangkan PDRB per kapita tertinggi berada di Kabupaten Kudus yaitu sebesar 16.030.016,80 rupiah dan rata-rata lama sekolah yaitu 8,11 tahun.

Penelitian yang dilakukan Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2006) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga di masa mendatang mereka dapat hidup lebih layak. Dalam konteks ini, pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Dimana tingginya pendidikan seseorang akan dapat menopang hidupnya untuk lebih layak yaitu lebih tingginya tingkat pendapatan yang diperoleh. Ini berarti menunjukkan hubungan langsung tingkat pendidikan terhadap pendapatan, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pendapatan.

Pendapatan suatu wilayah dapat diukur dari PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah yang dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat konsumsi yang diukur dengan pengeluaran per kapita. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin akan berkurang.

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita maka pengeluaran perkapita juga akan semakin tinggi. Sehingga tingginya PDRB per kapita akan menyebabkan jumlah penduduk miskin menjadi semakin rendah.

Teori konsumsi Keynes telah menyatakan dengan tegas bahwa faktor pendapatan itu memiliki pengaruh langsung terhadap konsumsi, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi, begitu sebaliknya. Oleh karena konsumsi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan, maka faktor pendapatan dapat dikatakan juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui faktor konsumsi.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Miskin, PDRB per Kapita, dan Pengeluaran per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	PDRB per kapita (ribu rupiah)	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)
1	Kab. Cilacap	318.751	7.067.398,15	633,50
2	Kab. Banyumas	319.848	2.914.069,53	630,75
3	Kab. Purbalingga	205.012	2.651.488,22	630,44
4	Kab. Banjarnegara	184.023	2.987.138,65	632,76
5	Kab. Kebumen	309.607	2.269.712,22	632,43
6	Kab. Purworejo	121.394	3.962.525,21	633,61
7	Kab. Wonosobo	194.023	2.297.336,29	629,26
8	Kab. Magelang	176.488	3.266.477,81	633,26
9	Kab. Boyolali	148.240	4.313.871,40	629,49
10	Kab. Klaten	220.180	3.655.531,20	643,92
11	Kab. Sukoharjo	94.449	5.663.606,21	644,60
12	Kab. Wonogiri	184.880	2.368.010,26	644,24
13	Kab. Karanganyar	118.791	5.816.255,42	647,87
14	Kab. Sragen	167.299	3.306.501,85	627,15
15	Kab. Grobogan	247.473	2.212.710,49	629,42
16	Kab. Blora	145.954	2.362.367,54	637,29
17	Kab. Rembang	147.154	3.585.066,64	640,28
18	Kab. Pati	184.052	3.459.368,68	643,48
19	Kab. Kudus	84.861	16.030.016,80	635,90
20	Kab. Jepara	104.744	3.687.308,59	631,04
21	Kab. Demak	202.236	2.684.238,22	631,72
22	Kab. Semarang	96.724	5.790.621,57	633,14
23	Kab. Temanggung	105.831	3.214.417,07	633,87
24	Kab. Kendal	152.431	5.254.589,18	635,70
25	Kab. Batang	112.169	3.188.276,06	628,82
26	Kab. Pekalongan	151.634	3.181.135,26	638,79
27	Kab. Pemasang	303.727	2.366.820,13	634,26
28	Kab. Tegal	195.456	2.315.180,20	637,09
29	Kab. Brebes	432.398	2.999.444,69	633,23
30	Kota Magelang	13.654	8.338.057,75	648,06
31	Kota Surakarta	77.971	9.121.278,65	648,23
32	Kota Salatiga	14.051	4.771.289,44	644,65
33	Kota Semarang	73.137	13.396.289,90	644,63
34	Kota Pekalongan	23.342	7.144.807,46	636,28
35	Kota Tegal	23.428	4.882.189,69	648,66

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Kemudian hubungan antara pendidikan dengan konsumsi. Salah satu komponen dari total biaya konsumsi adalah biaya pendidikan, yang tergolong sebagai konsumsi non makanan dan minuman. Ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga biaya konsumsi yang harus dikeluarkan, sebaliknya semakin rendah. Oleh karena itu, jelas bahwa pendapatan dan konsumsi memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan sebenarnya juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui faktor pendapatan dan konsumsi.

Pada Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa semakin tinggi rata-rata lama sekolah maka semakin tinggi pengeluaran per kapita, begitu sebaliknya. Hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Tabel 1.6

Jumlah Penduduk Miskin, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)
1	Kab. Cilacap	318.751	6,72	633,50
2	Kab. Banyumas	319.848	7,72	630,75
3	Kab. Purbalingga	205.012	6,81	630,44
4	Kab. Banjarnegara	184.023	6,20	632,76
5	Kab. Kebumen	309.607	6,84	632,43
6	Kab. Purworejo	121.394	7,70	633,61
7	Kab. Wonosobo	194.023	6,27	629,26
8	Kab. Magelang	176.488	7,26	633,26
9	Kab. Boyolali	148.240	7,29	629,49
10	Kab. Klaten	220.180	7,93	643,92
11	Kab. Sukoharjo	94.449	8,36	644,60
12	Kab. Wonogiri	184.880	6,29	644,24
13	Kab. Karanganyar	118.791	7,17	647,87
14	Kab. Sragen	167.299	6,88	627,15
15	Kab. Grobogan	247.473	6,76	629,42
16	Kab. Blora	145.954	6,25	637,29
17	Kab. Rembang	147.154	6,85	640,28
18	Kab. Pati	184.052	6,95	643,48
19	Kab. Kudus	84.861	8,11	635,90
20	Kab. Jepara	104.744	7,40	631,04
21	Kab. Demak	202.236	7,26	631,72
22	Kab. Semarang	96.724	7,40	633,14
23	Kab. Temanggung	105.831	6,86	633,87
24	Kab. Kendal	152.431	6,90	635,70
25	Kab. Batang	112.169	6,34	628,82
26	Kab. Pekalongan	151.634	6,66	638,79
27	Kab. Pemasang	303.727	6,49	634,26
28	Kab. Tegal	195.456	6,42	637,09
29	Kab. Brebes	432.398	5,62	633,23
30	Kota Magelang	13.654	10,10	648,06
31	Kota Surakarta	77.971	10,32	648,23
32	Kota Salatiga	14.051	9,75	644,65
33	Kota Semarang	73.137	9,98	644,63
34	Kota Pekalongan	23.342	8,66	636,28
35	Kota Tegal	23.428	8,25	648,66

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu di dalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung variabel tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009.

1.2 Perumusan Masalah

Jumlah penduduk yang sebagian besar penduduknya termasuk kategori miskin berada di Pulau Jawa (16,73 juta orang) atau sebesar 55,72% dari jumlah seluruh penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu sebesar 5,7 juta jiwa pada tahun 2009. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar kedua setelah Jawa Timur.

Masalah besarnya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya PDRB per kapita. PDRB per kapita Jawa Tengah terendah di Pulau Jawa. Penyebab lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan di Jawa Tengah yang dalam hal ini bisa dilihat dari rata-rata lamanya sekolah. Pengeluaran per kapita juga dapat dijadikan indikator terhadap besarnya jumlah penduduk miskin. Pengeluaran rata-rata Jawa Tengah yang ditunjukkan dalam Tabel 1.3 juga paling rendah di Pulau Jawa.

Berdasarkan data penduduk miskin per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat bahwa ada perbedaan jumlah penduduk miskin di antara Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang

mempunyai penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 432.398 jiwa, sedangkan yang mempunyai jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kota Magelang dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 13.654 jiwa.

Selanjutnya jika ditinjau dari rata-rata lama sekolah ternyata Kabupaten Brebes mempunyai rata-rata lama sekolah terendah yaitu 5,62 tahun. Sebaliknya Kota Magelang dengan jumlah penduduk miskin terkecil mempunyai rata-rata lama sekolah yang tinggi, yaitu 10,10 tahun. Jadi ada kecenderungan rata-rata lamanya sekolah berhubungan dengan jumlah penduduk miskin, yaitu semakin tinggi jumlah penduduk miskin semakin rendah rata-rata lamanya sekolah dan sebaliknya semakin rendah jumlah penduduk miskin semakin tinggi rata-rata lamanya sekolah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap konsumsi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap konsumsi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009?

5. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009?
6. Bagaimana pengaruh tingkat konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009?
7. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap konsumsi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap konsumsi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
5. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

6. Untuk menganalisis pengaruh tingkat konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.
7. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Sebagai bahan masukan untuk mengetahui penyebab besarnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Sebagai bahan bacaan, referensi maupun penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik pada penelitian tentang kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Pengertian Kemiskinan

Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas. Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidak berdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Chriswardani Suryawati, 2005). Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

- b. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- c. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
- b. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

2.1.2 Penyebab Kemiskinan

Kebijakan-kebijakan dari pemerintah selalu berupaya agar alokasi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun demikian, karena ciri dan keadaan masyarakat amat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan

jangka pendek. Sehingga kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan kelompok ekonomi di tingkat bawah (Swapna Mukhopadhy, 1985).

Selain itu, kebijakan dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan keadaan yang ada di luar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi pendanaan pembangunan (Fredericks, 1985).

Dengan demikian, kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Ketidak ikut sertaan dalam proses pembangunan ini dapat disebabkan karena secara alamiah tidak/belum mampu mendayagunakan faktor produksinya, dan dapat pula terjadi secara tidak alamiah. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berpartisipasi berakibat manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka.

Oleh karena itu kemiskinan disamping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada.

Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryawati (2005), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
- c. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
- d. *Resources management and the environment*, adalah unsur manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan

nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

- h. *Exploatif inetrmediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
- i. *Internal political fragmentation and civil stratfe*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *Interbational processe*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

2.1.3 Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Namun demikian, ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relatif (Arsyad, 1999:238).

1) Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin.

Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara

keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1997).

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

Kebutuhan dasar dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lainnya yang lebih tinggi. *United Nation Research Institute for Social Development (UNRISD)* menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 kelompok yaitu: pertama, kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan; kedua, kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup; dan ketiga, kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi.

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan orang atau keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh *International Labor Organization (ILO, 1976)* sebagai berikut:

“kebutuhan dasar meliputi 2 unsur: pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan, dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan, dan kultural.”

Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dimengerti. Tetapi penentuan garis kemiskinannya secara obyektif sulit dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum.

2) Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan (Miller, 1971).

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep

kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.

Oleh karena itu, Kincaid (1975) melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. Menurut kriteria Bank Dunia: pertama, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari pendapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan sangat timpang; kedua, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang; dan ketiga, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah tersebut menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan rendah.

2.1.4 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan bermacam-macam yakni: konsumsi beras perkapita pertahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum (KFM), dan tingkat kesejahteraan (Arsyad, 1999:240).

1. Tingkat Konsumsi Beras

Sajogyo (1977) menggunakan tingkat konsumsi beras perkapita sebagai indikator kemiskinan. Untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg perkapita pertahun bias digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 360 kg perkapita pertahun.

2. Tingkat Pendapatan

Menurut BPS (2011) Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan untuk bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp 233.740,- perkapita per bulan. Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional, maka termasuk dalam kategori miskin. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

3. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan yang lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN (1961) yang berjudul *International Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide* disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

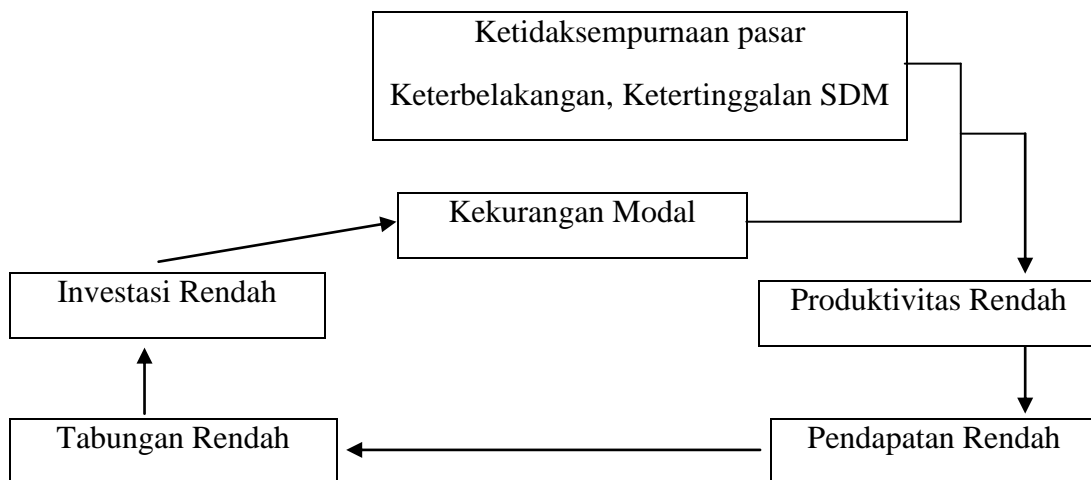
2.1.5 Teori Lingkaran Kemiskinan

Yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya

keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953 yang menyatakan “*a poor country is a poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Gambar 2.1

Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier



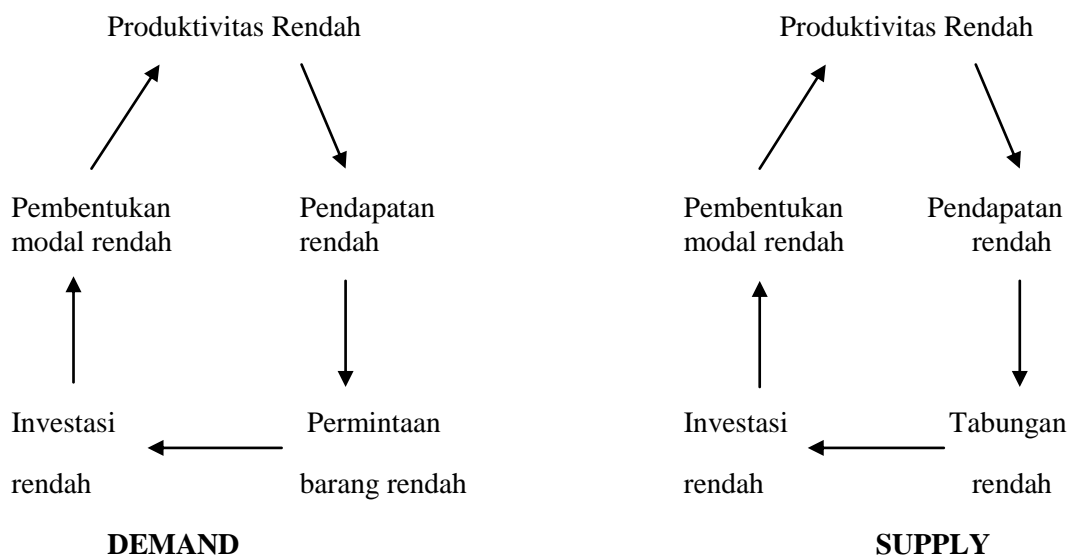
Sumber : Mudrajat Kuncoro, 1997

Menurut Nurkse ada dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari segi penawaran (*supply*) tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat

produktivitasnya juga rendah dan seterusnya. Dari segi permintaan (*demand*), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal adalah sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan oleh karena pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan masyarakat sangat rendah karena tingkat produktivitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

Gambar 2.2

Lingkaran Kemiskinan dari Nurkse



Sumber : Suryana, 2000

2.1.6 Pendidikan

Untuk pembangunan pendidikan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), GBHN 1999-2004 menetapkan arah kebijakan pembangunan pendidikan sebagai berikut :

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
3. Melakukan pembaharuan system pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan local sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional.
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.

5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan system pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan system pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

2.1.7 PDRB per kapita

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan

PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2009), angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.

2. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu :

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor netto.

2.1.8 Teori Konsumsi

Teori konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat konsumsi untuk barang normal, yaitu (Suparmono, 2004) :

- a. Pendapatan konsumen
- b. Tingkat harga
- c. Tingkat bunga
- d. Sosial ekonomi
- e. Selera
- f. Lain-lain

Faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa adalah tingkat pendapatan konsumen tersebut. Tingkat pendapatan berpengaruh secara positif, dalam arti apabila pendapatan konsumen naik, maka pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya.

Perilaku ini terutama untuk barang normal atau barang yang perilakunya mengikuti hukum permintaan dan penawaran.

Tingkat harga barang dan jasa di pasar juga menentukan pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Hal ini berkaitan dengan pendapatan riil yang diterima oleh konsumen tersebut. Secara nominal, pendapatan konsumen mungkin sama setiap periodenya akan tetapi apabila harga mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, maka hal ini akan mengakibatkan menurunnya daya beli seseorang. Dengan kata lain, tingkat harga berhubungan negative dengan pengeluaran konsumsi. Apabila harga mengalami kenaikan, maka pengeluaran konsumsi akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya.

Tingkat bunga, terutama bunga simpanan, juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Apabila tingkat bunga tinggi, konsumen cenderung untuk tidak membelanjakan uangnya dan lebih suka untuk menyimpan uangnya di bank. Hal ini dikarenakan konsumen tidak menginginkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan bunga dari uang yang dimilikinya. Begitu pula sebaliknya, apabila tingkat suku bunga rendah, maka konsumen cenderung untuk tidak menyimpan uangnya dan membelanjakannya untuk membeli barang dan jasa.

Selain faktor ekonomi, kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi pengeluaran konsumen dan jenis barang yang dibelinya. Seorang konsumen yang tinggal di lingkungan sederhana, pengeluarannya cenderung lebih rendah daripada konsumen yang tinggal di lingkungan yang lebih mewah. Kondisi psikologis ini

mempengaruhi konsumen dalam membeli jenis barang yang tidak begitu diperlukannya. Selain itu kondisi geografis, seperti iklim dan cuaca juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi seorang konsumen. Konsumen yang tinggal di daerah pegunungan dengan iklim dingin dan jauh dari pusat kota, harus mengeluarkan konsumsi yang lebih besar, misalnya untuk biaya transportasi dan konsumsi untuk menahan hawa dingin, dibandingkan dengan konsumen yang tinggal di dekat pusat kota.

2.1.9 Teori Konsumsi Keynes

Teori yang dikemukakan oleh Keynes dinamakan “*absolute income hypothesis*” atau *hipotesis pendapatan mutlak*. Persamaan aljabar fungsi konsumsi tersebut adalah (Sadono Sukirno, 2000) :

$$C = a + b Y_d \quad (2.1)$$

Dimana C menggambarkan nilai konsumsi yang dilakukan oleh semua rumah tangga dalam perekonomian; a adalah konsumsi otonomi, yaitu tingkat konsumsi yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional; b adalah kecondongan mengkonsumsi marginal (MPC), yaitu proporsi di antara pertambahan konsumsi dengan pertambahan pendapatan, dan Y_d adalah pendapatan disposebel.

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dinyatakan tiga ciri-ciri penting dari konsumsi rumah tangga dalam teori pendapatan mutlak. *Yang pertama, tingkat konsumsi rumah tangga pada suatu periode ditentukan oleh pendapatan disposebel yang diterima dalam periode tersebut.* Terdapat hubungan yang positif di antara konsumsi dan pendapatan disposebel, yaitu semakin tinggi pendapatan

disposebel semakin banyak tingkat konsumsi yang akan dilakukan rumah tangga. Ciri-ciri ini sesuai dengan sifat manusia yang telah diobservasi dalam teori kelakuan konsumen, yaitu keinginan manusia tidak terbatas tetapi kemampuannya untuk memenuhi keinginannya tersebut dibatasi oleh faktor-faktor produksi atau pendapatan yang dimilikinya. Dengan berubahnya pendapatan, rumah tangga akan berusaha membeli barang-barang lain yang dibutuhkannya yang tidak terjangkaunya pada pendapatan yang lebih rendah. Maka semakin tinggi pendapatan, semakin banyak pula perbelanjaan rumah tangga.

Yang kedua, teori konsumsi Keynes berpendapat bahwa apabila pendapatan disposebel meningkat, maka tingkat konsumsi juga akan meningkat tetapi pada jumlah yang lebih kecil dari peningkatan pendapatan. Dengan kata lain, kecondongan konsumsi marginal nilainya lebih besar dari nol tetapi kurang dari satu. Keynes tidak secara spesifik mengatakan bahwa nilai MPC adalah konstan. Di samping itu berdasarkan pengamatan pada tingkah laku konsumen dapat dikatakan bahwa pada pendapatan yang rendah apabila berlaku kenaikan pendapatan, maka proporsi di antara tambahan konsumsi dengan tambahan pendapatan adalah lebih tinggi dari proporsi tersebut pada pendapatan yang relatif tinggi. Berdasarkan observasi mengenai sikap konsumsi masyarakat, dapat dikatakan bahwa MPC pada pendapatan rendah adalah lebih tinggi dari MPC pada pendapatan tinggi. Dalam teori konsumsi Keynes, nilai MPC selalu dianggap tetap dan dinyatakan sebagai nilai “**b**” dalam persamaan (1).

Yang ketiga, walaupun seseorang atau suatu keluarga tidak mempunyai pendapatan, mereka masih tetap melakukan perbelanjaan konsumsi. Perbelanjaan

konsumsi disebut juga sebagai perbelanjaan otonomi, yaitu perbelanjaan yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan seseorang tetapi oleh faktor-faktor yang lain. Dalam persamaan (1), tingkat perbelanjaan konsumsi otonomi nilainya dinyatakan sebagai “a”.

2.1.10 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pendapatan

Pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap pendapatan dapat dinyatakan dengan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat pendapatannya, demikian sebaliknya. Hubungan ini berkenaan dengan status pekerjaan yang diperoleh seseorang pada tingkat pendidikan tertentu. Untuk pekerjaan sebagai manajer ataupun direktur perusahaan pasti dibayar dengan gaji yang tinggi, sehingga pendapatan mereka juga tinggi. Akan tetapi untuk mendapat pekerjaan sebagai manajer tersebut dibutuhkan keahlian dan kemampuan yang tinggi, yang diperoleh salah satunya melalui pendidikan yang tinggi juga. Demikian juga untuk pekerjaan buruh pelabuhan yang memperoleh upah kecil sehingga pendapatannya rendah, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Pada akhirnya memang ada pengaruh langsung dari tingkat pendidikan terhadap pendapatan seseorang.

2.1.11 Hubungan Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan dengan Konsumsi

Hubungan antara pendidikan dengan konsumsi. Salah satu komponen dari total biaya konsumsi adalah biaya pendidikan, yang tergolong sebagai konsumsi non makanan dan minuman. Ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan,

semakin tinggi juga biaya konsumsi yang harus dikeluarkan, sebaliknya semakin rendah. Jelas bahwa pendapatan dan konsumsi memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan, maka berdasarkan kondisi-kondisi ini, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui faktor pendapatan dan konsumsi.

2.1.12 Hubungan Tingkat Konsumsi dengan Kemiskinan

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menyebut seseorang itu miskin, digunakan garis kemiskinan sebagai indikatornya yang biasa diukur berdasarkan jumlah konsumsi kalori misalkan. Dengan demikian, seharusnya diantara faktor konsumsi total dengan tingkat kemiskinan ada faktor antaranya yakni konsumsi kalori. Akan tetapi konsumsi kalori tidak dimasukkan, sehingga dianggap konsumsi total memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan, tanpa ada faktor perantaranya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh peneliti.

Pada awal pembangunan ekonomi suatu negara umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan (*growth*). Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang

bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian dan pemerataannya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang hanya melihat pengaruh langsung dari variabel-variabel yang mempengaruhi kemiskinan. Dalam penelitian ini tidak hanya melihat pengaruh langsung tetapi juga pengaruh tidak langsung dari PDRB per kapita, rata-rata lam sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap jumlah penduduk miskin.

Secara ringkas dalam Tabel 2.1 disajikan ringkasan penelitian – penelitian sejenis yang menjadi referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel		Alat Analisis	Hasil
			Terikat	Bebas		
1.	Diana Wijayanti & Heri Wahono (2003)	Analisis konsentrasi kemiskinan di Indonesia Periode tahun 1999 - 2005	- Tingkat kemiskinan	- Tingkat kesehatan - Tingkat pendidikan	OLS	- Tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.
2.	Adit Agus Prasetyo (2010)	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah	- Tingkat kemiskinan	- Pertumbuhan ekonomi - Upah minimum - Pendidikan - Tingkat pengangguran	OLS	- Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
3.	Ari Widiastuti (2010)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004 – 2008	- Tingkat kemiskinan	- Pertumbuhan ekonomi - Jumlah penduduk - Pendidikan - Desentralisasi fiskal	OLS	- Pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negative dan signifikan. - Jumlah penduduk dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan.

4.	Ravi Dwi Wijayanto (2010)	Analisis pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2005 – 2008	- Tingkat kemiskinan	- PDRB - Pendidikan - Pengangguran	OLS	- PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan. - Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. - Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan.
5.	Samsubar Saleh (2002)	Faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan regional di Indonesia	- Tingkat kemiskinan	- Tingkat pendapatan per kapita - Pengeluaran pemerintah - Tingkat kesehatan	Pendekatan regresi	- Pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan. - Pengeluaran pemerintah tidak signifikan. - Tingkat kesehatan signifikan dan positif.
6.	Wongdesmiwati (2009)	Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.	- Jumlah penduduk miskin	- Jumlah penduduk miskin - PDRB - Angka melek huruf - Rumah tangga pengguna listrik - Konsumsi masyarakat - Angka harapan hidup.	Diskriptif & Regresi.	Variabel Jumlah penduduk, PDRB, dan angka melek huruf berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan dari beberapa hasil kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap konsumsi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap konsumsi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
5. Tingkat pendapatan mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
6. Tingkat konsumsi mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
7. Tingkat pendidikan, pendapatan, dan konsumsi mempunyai pengaruh negatif secara serentak terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

2.4. Kerangka Pemikiran

Pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap pendapatan dapat dinyatakan dengan hipotesis bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat pendapatannya, demikian sebaliknya. Hubungan ini berkenaan dengan status pekerjaan yang diperoleh seseorang pada tingkat pendidikan tertentu. Untuk pekerjaan sebagai manajer ataupun direktur perusahaan pasti dibayar dengan gaji yang tinggi, sehingga pendapatan mereka juga tinggi. Akan tetapi untuk mendapat pekerjaan sebagai manajer tersebut dibutuhkan keahlian dan kemampuan yang tinggi, yang diperoleh salah satunya melalui pendidikan yang tinggi juga. Demikian juga untuk pekerjaan buruh pelabuhan yang memperoleh upah kecil sehingga pendapatannya rendah, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Pada akhirnya memang ada pengaruh langsung dari tingkat pendidikan terhadap pendapatan seseorang.

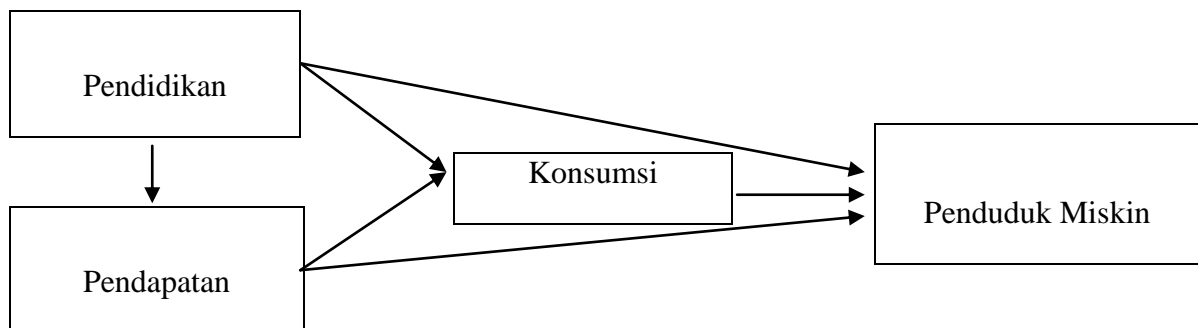
Kemudian hubungan antara pendidikan dengan konsumsi. Salah satu komponen dari total biaya konsumsi adalah biaya pendidikan, yang tergolong sebagai konsumsi non makanan dan minuman. Ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga biaya konsumsi yang harus dikeluarkan, sebaliknya semakin rendah. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa pendapatan dan konsumsi memiliki pengaruh langsung terhadap kemiskinan, maka berdasarkan kondisi-kondisi ini, akhirnya dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan sebenarnya juga memiliki

pengaruh tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui faktor pendapatan dan konsumsi.

Teori Konsumsi Keynes telah menyatakan dengan tegas bahwa faktor pendapatan itu memiliki pengaruh langsung terhadap konsumsi, dimana semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi, begitu sebaliknya. Oleh karena konsumsi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan, maka faktor pendapatan dapat dikatakan juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui faktor konsumsi.

Beranjak dari konsep pemikiran di atas, akhirnya dapat digambarkan sebuah model jalur yang melibatkan variabel-variabel pendidikan, pendapatan, konsumsi dan kemiskinan sebagaimana yang disajikan pada kerangka pemikiran dalam Gambar 2.3 berikut ini :

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Hubungan Kausalitas tingkat pendidikan, pendapatan, dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin.



Sumber : Arief Daryanto dan Yundi Hafizrianda, 2010, modifikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (M. Nasir, 1998). Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi variabel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel eksogen (*exogenous variable*) dan variabel endogen (*endogenous variable*).

1. Variabel Endogen (*endogenous variable*)

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009.

2. Variabel Eksogen (*exogenous variable*)

Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan konsumsi.

Sedangkan definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Miskin

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 (dalam satuan jiwa).

2. Pendidikan

Pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rata-rata lama sekolah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 (dalam satuan tahun).

3. Pendapatan

Pendapatan diukur dari PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Data PDRB per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 atas dasar harga konstan tahun 2000 (dalam satuan rupiah).

4. Konsumsi

Konsumsi diukur dari pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengeluaran per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 (dalam satuan rupiah).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data cross section dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2009. Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil-hasil penelitian.

3.3 Metode Analisis

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009 dilakukan analisis dengan menggunakan Model Analisis Jalur. Model analisis jalur adalah untuk menganalisis pola hubungan kausal antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung, secara serempak atau mandiri beberapa variabel penyebab terhadap variabel akibat.

Analisis jalur (*Path Analysis*) dikembangkan oleh Sewall Wright (1934). Path analysis digunakan apabila secara teori permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan sebab akibat. Tujuannya adalah menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat.

Asumsi-asumsi yang mendasari analisis jalur adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan antar variabel bersifat linier, aditif, dan kausal.

$$X_1 = \alpha + \beta X_2 + \gamma X_3 + \varepsilon$$

- b. Variabel-variabel residual dalam model tidak berkorelasi dengan variabel-variabel bebas.
- c. Variabel terikat (endogen) diukur dalam skala interval.

- d. Memiliki multikolonieritas yang lemah, yang berarti hubungan linier yang pasti antara variabel yang menjelaskan dari model regresi memiliki hubungan yang lemah.
- e. Spesifikasi model yang tepat untuk menginterpretasikan koefisien jalur.

Beberapa istilah dan definisi dalam analisis jalur (*path analysis*) menurut Harun Al-Rasyid (2005) dalam (Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, 2009) :

1. Dalam *Path Analysis*, hanya menggunakan sebuah lambang variabel, yaitu X. untuk membedakan X yang satu dengan X yang lainnya, digunakan *subscript* (indeks). Contoh : $X_1, X_2, X_3 \dots X_k$.
2. Ada dua jenis variabel, yaitu variabel yang menjadi pengaruh (*exogenous variable*), dan variabel yang dipengaruhi (*endogenous variable*).
3. Lambang hubungan langsung dari eksogen ke endogen adalah panah bermata satu, yang bersifat *recursive* atau arah hubungan yang tidak berbalik/ satu arah.
4. Diagram jalur merupakan diagram atau gambar yang mensyaratkan hubungan terstruktur antar variabel.

Beberapa istilah lain dalam analisis jalur menurut Danang Sunyoto (2011) :

- Model Jalur

Model jalur adalah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara dan tergantung. Pola hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak panah. Anak panah-anak panah tunggal menunjukkan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel *exogenous* atau perantara dengan satu variabel tergantung atau lebih. Anak panah juga menghubungkan kesalahan (*variabel residue*) dengan semua variabel *endogenous* masing-masing. Anak panah ganda menunjukkan korelasi antara pasangan variabel-variabel *exogenous*.

- Variabel *exogenous* (eksogen)

Variabel-variabel *exogenous* dalam suatu model jalur adalah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju kearahnya, selain pada bagian kesalahan pengukuran. Jika antara variabel *exogenous* dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah dengan kepala dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut.

- Variabel *endogenous* (endogen)

Variabel *endogenous* adalah variabel yang mempunyai anak-anak panah menuju kearah variabel tersebut. Variabel yang termasuk didalamnya adalah mencakup semua variabel perantara dan tergantung. Variabel perantara *endogenous* mempunyai anak panah yang menuju kearahnya dan dari arah

variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Sedang variabel tergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya.

- Koefisien jalur/ pembobotan jalur

Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar atau disebut ‘beta’ yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam suatu model jalur tertentu. Oleh karena itu, jika suatu model mempunyai dua atau lebih variabel-variabel penyebab, maka koefisien-koefisien jalurnya merupakan koefisien-koefisien regresi parsial yang mengukur besarnya pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dalam suatu model jalur tertentu yang mengontrol dua variabel lain sebelumnya dengan menggunakan data yang sudah distandarkan atau matriks korelasi sebagai masukan.

- Istilah gangguan

Istilah kesalahan residual yang secara teknis disebut sebagai ‘gangguan’ atau “*residu*” mencerminkan adanya varian yang tidak dapat diterangkan atau pengaruh dari semua variabel yang tidak terukur ditambah dengan kesalahan pengukuran.

- Pola hubungan

Dalam analisis jalur tidak digunakan istilah variabel bebas ataupun tergantung. Sebagai gantinya digunakan istilah variabel *exogenous* dan *endogenous*.

- Model *Recursive*

Model penyebab yang mempunyai satu arah. Tidak ada membalik (*feed back loop*) dan tidak ada pengaruh sebab akibat (*reciprocal*). Dalam model ini satu variabel tidak dapat berfungsi sebagai penyebab dan akibat dalam waktu yang bersamaan.

- Model *Non-recursive*

Model penyebab dengan disertai arah yang membalik (*feed back loop*) atau adanya pengaruh sebab akibat (*reciprocal*).

Model analisis jalur merupakan salah satu aplikasi dari analisis regresi (Kusnendi, 2004:2). Oleh karena itu, perhitungan koefisien jalur dapat didasarkan pada koefisien regresi (Nirwana K.S., 1994:15) dalam bukunya Sambas A.M dan Maman A, 2007:231.

Berdasarkan pendapat tersebut, perhitungan koefisien jalur dalam penelitian ini menggunakan program SPSS.

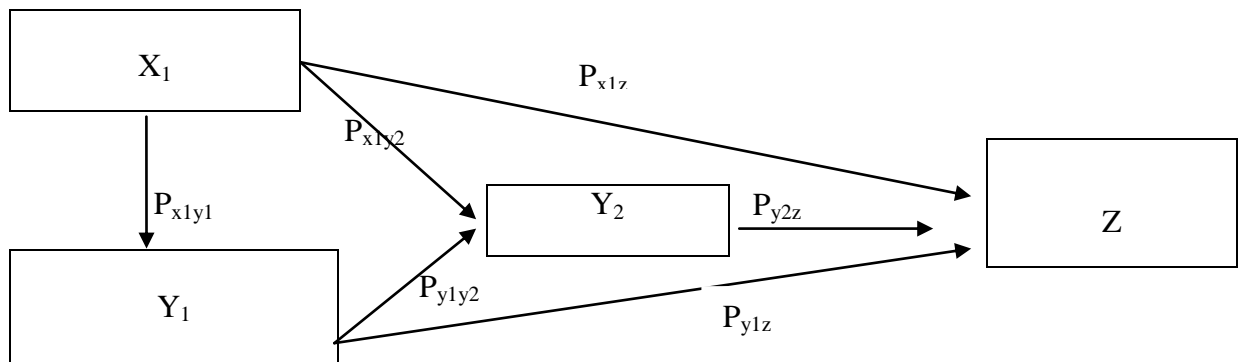
Langkah kerja yang disarankan dalam penyelesaian analisis jalur ini adalah sebagai berikut (Ating Somantri dan Sambas Ali Muhidin, 2006) :

1. Menggambarkan diagram jalur.
2. Membuat persamaan struktural.
3. Menghitung koefisien jalur dengan langkah-langkah :
 - a. Menghitung matriks korelasi antarvariabel.
 - b. Menghitung matriks korelasi variabel eksogen.
 - c. Menghitung matriks invers korelasi variabel eksogen.
 - d. Menghitung semua koefisien jalur.
4. Menghitung koefisien determinasi.
5. Menghitung besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.
6. Pengujian hipotesis/ menguji kebermaknaan koefisien jalur.

3.3.1 Diagram Jalur

Beranjak dari semua konsep pemikiran dalam kajian pustaka, maka penelitian ini dapat digambarkan sebuah model jalur yang melibatkan variabel-variabel pendidikan, pendapatan, konsumsi, dan jumlah penduduk miskin sebagaimana disajikan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram Jalur dari Hubungan Kausalitas tingkat pendidikan, pendapatan, dan konsumsi terhadap jumlah penduduk miskin.



Keterangan :

X_1 = Variabel Pendidikan

Y_1 = Variabel Pendapatan

Y_2 = Variabel Konsumsi

Z = Variabel Jumlah Penduduk Miskin

$P_{x_1y_1}$ = Koefisien jalur variabel pendidikan – X_1 dengan pendapatan – Y_1 , menggambarkan besarnya pengaruh langsung variabel pendidikan – X_1 terhadap pendapatan – Y_1 .

$P_{x_1y_2}$ = Koefisien jalur variabel pendidikan – X_1 dengan konsumsi – Y_2 , menggambarkan besarnya pengaruh langsung variabel pendidikan – X_1 terhadap konsumsi – Y_2 .

$P_{y_1y_2}$ = Koefisien jalur variabel pendapatan – Y_1 dengan konsumsi – Y_2 , menggambarkan besarnya pengaruh langsung variabel pendapatan – Y_1 terhadap konsumsi – Y_2 .

P_{x_1z} = Koefisien jalur variabel pendidikan – X_1 dengan jumlah penduduk miskin – Z , menggambarkan besarnya pengaruh langsung variabel pendidikan – X_1 terhadap jumlah penduduk miskin – Z .

P_{y_1z} = Koefisien jalur variabel pendapatan – Y_1 dengan jumlah penduduk miskin – Z , menggambarkan besarnya pengaruh langsung variabel pendapatan – Y_1 terhadap jumlah penduduk miskin – Z .

P_{y_2z} = Koefisien jalur variabel konsumsi – Y_2 dengan jumlah penduduk miskin – Z , menggambarkan besarnya pengaruh langsung variabel konsumsi – Y_2 terhadap jumlah penduduk miskin – Z .

3.3.2 Persamaan Struktural

Jika variabel tingkat pendidikan dinotasikan X_1 , jumlah pendapatan adalah Y_1 , jumlah konsumsi adalah Y_2 , dan tingkat kemiskinan adalah Z , maka persamaan struktural dari model jalur ini adalah :

$$Y_1 = P_{x_1y_1}Y_1X_1 + e_1 \dots\dots\dots (3.1)$$

$$Y_2 = P_{x_1y_2}Y_2X_1 + P_{y_1y_2}Y_2Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (3.2)$$

$$Z = P_{x_1z}ZX_1 + P_{y_1z}ZY_1 + P_{y_2z}ZY_2 + e_3 \dots\dots\dots (3.3)$$

3.3.3 Koefisien Jalur

Langkah- langkah :

- a. Menghitung matriks korelasi antarvariabel.
- b. Menghitung matriks korelasi variabel eksogen.
- c. Menghitung matriks invers korelasi variabel eksogen.
- d. Menghitung semua koefisien jalur.

3.3.4 Koefisien Determinasi

Menghitung $R^2_{z(x_1,y_1,y_2)}$, yaitu koefisien determinasi total X_1 , Y_1 , dan Y_2 terhadap Z atau besarnya pengaruh variabel eksogenus secara bersama-sama (gabungan) terhadap variabel endogenus dengan menggunakan rumus :

$$R^2_{z(x_1,y_1,y_2)} = (P_{zx1} \quad P_{zy1} \quad P_{zy2}) \begin{bmatrix} r_{x1z} \\ r_{y1z} \\ r_{y2z} \end{bmatrix}$$

3.3.5 Pengujian Koefisien Jalur

Menguji kebermaknaan (test of significance) setiap koefisien jalur yang telah dihitung, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, serta menguji perbedaan besarnya pengaruh masing-masing variabel eksogenus terhadap variabel endogenus. Dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Pengujian koefisien jalur $P_{y_1x_1}$:

- Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : P_{y_1x_1} = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara X_1 terhadap Y_1

$H_1 : P_{y_1x_1} > 0$, artinya terdapat pengaruh positif antara X_1 terhadap Y_1

- Menentukan statistik uji yang digunakan

$$t = \frac{P_{y_1x_1}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{y_1x_1}) C_{11}}{n - k - 1}}}$$

- Menentukan nilai kritis pada derajat bebas (db) = $n - k - 1$.
- Menentukan nilai hitung t terletak di dalam daerah penolakan H_0 atau penerimaan H_0 .
- Kesimpulan

2. Pengujian koefisien jalur $P_{y_2x_1}$:

- Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : P_{y_2x_1} = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara X_1 terhadap Y_2

$H_1 : P_{y_2x_1} > 0$, artinya terdapat pengaruh positif antara X_1 terhadap Y_2

- Menentukan statistik uji yang digunakan

$$t = \frac{P_{y2x1}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{y2x1}) C_{11}}{n - k - 1}}}$$

- Menentukan nilai kritis pada derajat bebas (db) = $n - k - 1$.
- Menentukan nilai hitung t terletak di dalam daerah penolakan H_0 atau penerimaan H_0 .
- Kesimpulan

3. Pengujian koefisien jalur P_{y2y1} :

- Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : P_{y2y1} = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara Y_1 terhadap Y_2

$H_1 : P_{y2y1} > 0$, artinya terdapat pengaruh positif antara Y_1 terhadap Y_2

- Menentukan statistik uji yang digunakan

$$t = \frac{P_{y2y1}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{y2y1}) C_{11}}{n - k - 1}}}$$

- Menentukan nilai kritis pada derajat bebas (db) = $n - k - 1$.
- Menentukan nilai hitung t terletak di dalam daerah penolakan H_0 atau penerimaan H_0 .
- Kesimpulan

4. Pengujian pengaruh bersama-sama variabel X_1 dan Y_1 terhadap Y_2 :

- Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : P_{y_2(x_1, y_1)} = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara X_1 dan Y_1 terhadap Y_2

$H_1 : P_{y_2(x_1, y_1)} > 0$, artinya terdapat pengaruh positif antara X_1 dan Y_1 terhadap Y_2

- Menentukan statistik uji yang digunakan

$$F = \frac{(n - k - 1)(R^2_{y_2(x_1, y_1)})}{k(1 - R^2_{y_2(x_1, y_1)})}$$

- Menentukan nilai kritis pada derajat bebas (db) = $n - k - 1$.
- Menentukan nilai hitung t terletak di dalam daerah penolakan H_0 atau penerimaan H_0 .
- Kesimpulan

5. Pengujian koefisien jalur P_{zx_1} :

- Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : P_{zx_1} = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara X_1 terhadap Z

$H_1 : P_{zx_1} < 0$, artinya terdapat pengaruh negatif antara X_1 terhadap Z

- Menentukan statistik uji yang digunakan

$$t = \frac{P_{zx1}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{zx1}) C_{11}}{n - k - 1}}}$$

- Menentukan nilai kritis pada derajat bebas (db) = $n - k - 1$.
- Menentukan nilai hitung t terletak di dalam daerah penolakan H_0 atau penerimaan H_0 .
- Kesimpulan

6. Pengujian koefisien jalur P_{zy1} :

- Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : P_{zy1} = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara Y_1 terhadap Z

$H_1 : P_{zy1} < 0$, artinya terdapat pengaruh negatif antara Y_1 terhadap Z

- Menentukan statistik uji yang digunakan

$$t = \frac{P_{zy1}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{zy1}) C_{11}}{n - k - 1}}}$$

- Menentukan nilai kritis pada derajat bebas (db) = $n - k - 1$.
- Menentukan nilai hitung t terletak di dalam daerah penolakan H_0 atau penerimaan H_0 .

- Kesimpulan

7. Pengujian koefisien jalur P_{zy2} :

- Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : P_{zy2} = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara Y_2 terhadap Z

$H_1 : P_{zy2} < 0$, artinya terdapat pengaruh negatif antara Y_2 terhadap Z

- Menentukan statistik uji yang digunakan

$$t = \frac{P_{zy2}}{\sqrt{\frac{(1 - R_{zy2}^2) C_{22}}{n - k - 1}}}$$

- Menentukan nilai kritis pada derajat bebas (db) = $n - k - 1$.
- Menentukan nilai hitung t terletak di dalam daerah penolakan H_0 atau penerimaan H_0 .
- Kesimpulan

8. Pengujian pengaruh bersama-sama variabel X_1, Y_1, Y_2 , dan Z :

- Menentukan hipotesis statistik

$H_0 : P_{z(x_1, y_1, y_2)} = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh antara X_1, Y_1 , dan Y_2 , terhadap Z

$H_1 : P_{z(x_1, y_1, y_2)} < 0$, artinya terdapat pengaruh negatif antara X_1 , Y_1 , dan Y_2 terhadap Z

- Menentukan statistik uji yang digunakan

$$F = \frac{(n - k - 1)(R^2_{z(x_1 y_1 y_2)})}{k(1 - R^2_{z(x_1 y_1 y_2)})}$$

- Menentukan nilai kritis pada derajat bebas (db) = $n - k - 1$.
- Menentukan nilai hitung t terletak di dalam daerah penolakan H_0 atau penerimaan H_0 .
- Kesimpulan